

TAJUK RENCANA

Dirgahayu Republik Indonesia

KAMIS besok Bangsa Indonesia memperingati hari jadinya ke-78. Hampir di setiap sudut negeri ini bendera merah putih berkibar. Berbagai lomba diadakan untuk memeriahkan ulang tahun. Meriah suasana saat ini.

Kekompakan semangat ini mudah-mudahan juga terjadi, saat bangsa ini melangkah untuk menggapai kesejahteraan. Jangka panjang, negeri ini bersiap mencapai target sasaran Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ada tiga acuan penting untuk menggapai visi itu. *Pertama* stabilitas negara. *Kedua*, keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan serta *ketiga* adalah sumber daya manusia (SDM). Tiga acuan ini yang diungkapkan Presiden Jokowi menandai peluncuran Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RA-JPN) 2023-2045.

Yang paling dekat adalah tongkat estafet kepemimpinan, yang dilanjutkan dengan tongkat estafet kepemimpinan berikutnya. Presiden mengibaratkan semacam tingkatan sekolah dari SD, SMP ke SMA dan seterusnya. Jangan sudah sampai ke SMA balik lagi ke SD, kata Presiden. Maka even paling dekat adalah dalam Pemilu 2024 mendatang, di antaranya adalah memilih pemimpin. Mencari sosok pemimpin yang kualitasnya terus naik. Pemimpin nasional, daerah bahkan legislatif yang harus makin baik kualitasnya.

Sampai saat ini, jadwal tahapan pemilu sudah dijalan berjalan lancar. Namun bukan berarti tanpa kendala. Politik uang, hoaks, ujaran kebencian masih menghantui jalannya proses pesta demokrasi ini. Hingga kemudian polisi membentuk satuan tugas anti-politik uang. Operasi ini rutin, namun masih saja penyakit pemilu itu sulit diberantas (KR 10/8).

Memberantas politik uang dalam pemilihan umum, merupakan tantangan serius dalam memastikan integritas demokrasi. Diperlukan pendidikan dan kesadaran public. Yakni pendidikan mengenai pentingnya partisipasi yang bersih dan etis dalam pemilihan umum sangat penting. Kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya politik uang dapat membantu mengubah budaya politik di masyarakat, harus dilakukan juga kontestan,

termasuk partai politik.

Perlunya transparansi dana kampanye. Pemerintah harus mewajibkan calon dan partai politik untuk secara transparan melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye. Semua laporan keuangan kampanye harus mudah diakses oleh publik untuk memastikan akuntabilitas. Juga harus transparan, mengenai batasan dana kampanye. Mengatur batasan jumlah dana yang dapat dihabiskan calon atau partai politik dalam kampanye.

Perlunya sanksi yang ketat. Sebab menetapkan sanksi yang keras bagi calon atau partai politik yang terbukti terlibat dalam politik uang perlu dilakukan. Termasuk diskualifikasi dari pemilihan atau larangan berpartisipasi dalam pemilihan selama beberapa tahun.

Penegakan hukum independen. Memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki kemandirian dan kebebasan untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran politik uang tanpa adanya campur tangan politik. Meningkatkan pengawasan atas sumber dana yang masuk ke kampanye, baik oleh otoritas pemerintah dan lembaga independen. Pengawasan yang lebih ketat dapat membantu mencegah dana ilegal atau tidak sah digunakan dalam kampanye.

Partai politik harus melibatkan anggotanya dalam proses pemahaman tentang praktik politik yang bersih dan etis. Keterlibatan masyarakat sipil. Masyarakat sipil, termasuk LSM dan media massa, dapat berperan penting dalam memantau dan melaporkan praktik politik uang. Tentu juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Perubahan budaya politik, yakni mengubah budaya politik yang mementingkan integritas, ideologi, dan kualifikasi calon daripada dana yang dimilikinya. Ini membutuhkan waktu, tetapi perubahan budaya dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Memang perlu kesadaran bersama, bahwa memberantas politik uang adalah usaha yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Tidak ada solusi tunggal.

Dirgahayu bangsa dan negaraku Indonesia.

Sukarno, Sandiwara, dan Imajinasi Indonesia

CINDY Adams dalam bukunya yang terkenal, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, memulai paragraf pertamanya dengan memberi kesan ‘ekera-mat’ saat melukiskan ketokohan presiden pertama Indonesia, Sukarno. ”Cara yang mudah menggambarkan sosok Sukarno ialah dengan menyebutnya seorang mahapencinta. Dia mencintai negerinya, dia mencintai rakyatnya, dia mencintai perempuan, dia mencintai seni, dan di atas segala-galanya, dia mencintai dirinya sendiri”, tulis Cindy Adams.

Sukarno mencintai seni? Seni yang seperti apa? Ingatan penulis, atau mungkin juga Anda sebagai pembaca karya-karya (tentang) Sukarno, langsung tertuju saat ia mengalami masa pembuangan dan diasingkan ke Ende, Flores, selama hampir lima tahun, dari 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938.

Apa yang sebenarnya terjadi di Ende? ”Aku bagai seekor burung elang yang dipotong sayapnya”, ungkap Sukarno, menggambarkan situasi pengasingannya kala itu. ”Mengapa di sini (Ende)? Mengapa di Flores?”, Inggit, istri Sukarno, sering mengulang pertanyaan ini, sebab para pejuang kemerdekaan lain pada umumnya diasingkan ke Digul.

’Penjara’ di Ende

Di Ende, Sukarno benar-benar merasa sendiri, meski ia sadar, jumlah penduduk di sana sekitar 5.000 jiwa. Aktivitasnya dibatasi. Tidak boleh bepergian lebih dari 5 kilometer dari rumah yang ditempati. Tidak boleh naik perahu dan berbicara kepada orang. Semua kegiatan Sukarno diawasi oleh mata-mata pengintai yang jika ia berpergian, pasti diikuti oleh orang tak dikenal dalam jarak, berdasarkan kebijakan Belanda, minimal 60 meter.

Situasi itu semakin menyedihkan karena orang-orang Ende cenderung menjauhi Sukarno. ”.. tak ubahnya aku ini hama penyakit”, keluhnya. Pada akhirnya Sukarno sadar. Di Sukamiskin tubuhnya yang dipenjara, sedang di

Ali Usman

Ende-Flores semangatnya yang dipenjara. Ia tak menyerah pada nasib. Yang dilakukannya melebur dan mendekati rakyat jelata, orang-orang yang awam politik, orang-orang yang bahkan buta huruf, para nelayan, pemetik kelapa,



GRAFIS JOS

sopir mobil, buruh atau para pembantu yang tidak bekerja.

Upaya Sukarno tersebut membuahkan hasil. Ia lepas dari depresi berat, dan nyaris putus asa hingga sempat terlintas dalam pikirannya untuk mengakhiri hidup. Hari-hari baru di Ende sejak masyarakat sekitar mulai menerima kehadirannya, saling berkunjung ke rumah, muncul ide untuk bermain sandiwara. Sejarah mencatat, menurut pengakuan Sukarno sendiri, dari tahun 1934 sampai 1938 telah menulis 12 naskah.

Klub Tonil Kelimutu

Sukarno menanamkan semangat perjuangan kemerdekaan kepada sahabat-sahabatnya melalui sandiwara. Ia mendirikan perkumpulan sandiwara dengan nama *Toneel Club Kelimutu* (Klub Tonil Kelimutu). Kelimutu merupakan

nama danau tiga warna yang terkenal di Ende. Di perkumpulan ini, Sukarno bertindak sebagai *single fighter*, memborong semua job, dari ketua klub, penulis naskah, sutradara, melatih para pemain, melukis latar panggung, mencari tempat pertunjukan, sampai bertindak sebagai penjual karcis.

Nafas utama dalam drama yang dipentaskan Klub Tonil Kelimutu adalah ‘evolusi’ dengan tujuan ganda. Sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus membangkitkan semangat perjuangan, terutama kaum muda.

Transplantasi Hati

Naskah pertama Sukarno yang dipentaskan diilhami oleh Frankenstein, berjudul Dr. Setan. Pemeran utamanya Boris Karloff Indonesia yang menghidupkan mayat dengan melakukan transplantasi hati dari orang yang hidup. Pesan moral yang tersembunyi dari drama ini, tubuh Indonesia yang sudah tidak bernyawa dapat bangkit dan hidup lagi.

Sandiwara lainnya adalah *Indonesia ’45*. Di dalamnya, Sukarno mengisahkan ramalan tentang pecahnya Perang Pasifik. Ramalan ini pernah ia sampaikan juga pada sebuah rapat umum di Yogyakarta, tahun 1929

*)**Ali Usman**, *Dosen Agidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara (PSPBN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Belum Merdeka dari Korupsi

IRONI terpampang di depan kita. Sudah 78 tahun merdeka, rakyat belum sejahtera namun korupsi terus merajalela. Indeks korupsi masih tinggi. Laporan Transparency Internasional terbaru menunjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Sebelumnya, di peringkat ke-96 secara global.

Kemerdekaan semestinya dipahami sebagai jalan pembuka ruang bagi bangsa kita untuk membangun dan memperkuat peradaban. Ini terjadi seiring dengan terbentuknya negara, pemerintahan dan berlakunya sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya. Peradaban bisa dimaknai perpaduan hasil-hasil kebudayaan, ekonomi, politik dan hukum. Selain tercermin dari kesejahteraan, peradaban juga memantul dari konsistensi pelaksanaan mewujudkan nilai-nilai ideal kehidupan melalui praktik etika, moral, norma dan hukum di dalam masyarakat.

Tidak Malu

Ironisnya praktik etika, moral, norma dan hukum yang terjadi selama 78 tahun belum secara optimal menghasilkan pola pikir dan perilaku bangsa yang ideal atau berkeadaban tinggi. Karakter pun belum terbangun secara kuat. Integritas masih jadi persoalan kolektif. Komitmen pada nilai-nilai etik, sebagai prasyarat di dalam menjalani peran-peran sosial, kultural dan politik pun belum benar-benar kokoh. Ujungnya ketika berkuasa cenderung korup.

Banyak orang tidak lagi malu ketika terjerat korupsi. *Pertama*, karena huku-

Indra Tranggono

mannya tidak berat. *Kedua* masih bisa menguasai uang negara yang dicaplok. *Ketiga* tidak ada sanksi sosial, misalnya berupa pengucilan di masyarakat.

Hal lain yang memprihatinkan adalah upaya sistematis untuk melemahkan lembaga antikorupsi KPK. Ini membuka ruang bagi siapa saja yang berkuasa (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk ramai-ramai bancakan uang negara. Politik akhirnya cenderung jadi jalan bagi para aktornya untuk menggerogoti uang negara. Atas dasar berbagai kenyataan itu, kita semakin sadar bahwa kita belum merdeka dari korupsi. Korupsi yang dilakukan komunitas politik hitam, komunitas hukum hitam dan komunitas ekonomi hitam adalah bentuk penjajahan permanen yang sulit dienyahkan dari republik ini.

Korupsi bisa dipahami sebagai penyakit sosial yang punya banyak akar. Yang paling utama adalah kekuasaan. Selain penerapan hukum yang tegas, berani dan konsisten sejatinya korupsi bisa dikikis melalui penguatan karakter bangsa. Karakter berkaitan dengan integritas, komitmen dan dedikasi manusia di dalam menjalani peran-peran sosial, politik dan budaya. Banyak sumber nilai ajaran etik dan moral yang bisa dijadikan asupan, misalnya agama dan budaya. Orang yang punya karakter kuat akan memiliki tiga nilai lebih dalam dirinya. Yakni merasa malu ketika melakukan pe-

nyimpangan etik dan moral. Takut pada risiko hukum. Dan, takut pada rusaknya kepribadian, nama baik dirinya dan keluarga jika melakukan tindakan amoral seperti korupsi.

Bangsa Jepang

Mengikis korupsi juga bisa dilakukan dengan keteladanan para senior dan mereka yang punya kuasa yang tidak sudi korupsi. Ini dilakukan di Jepang. Menurut tokoh NU KH Agil Siradj, di Jepang tidak ada orang yang berani korupsi. Alasannya, jika korupsi mereka takut akan ditiru anak-anaknya. Mereka tidak mau menjadi keluarga/trah dengan cap koruptor. Marwah keluarga dan trah dijunjung tinggi. Ini contoh sederhana yang bisa dijadikan orientasi nilai jika bangsa kita mau memberantas korupsi. Dibanding kekayaan yang melimpah, nama baik selalu dijadikan pilihan utama.

*)**Indra Tranggono**, *praktisi budaya dan esais.*

Pojok KR

Dirgahayu Kemerdekaan Negeriku

Beraba

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Hariyadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Nor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Pertintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan :** H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto. **Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP